

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Politik dan media ibarat dua sisi dari satu mata uang. Media massa, khususnya harian dan elektronik, memerlukan karakteristik yang dimiliki oleh ranah politik praktis seperti hingar bingar, cepat, tak memerlukan kedalaman berpikir, dan terdiri dari tokoh-tokoh antagonis dan protagonis, begitu juga Politik memerlukan media massa sebagai wadah dalam mengelola kesan yang hendak diciptakan. Tidak ada gerakan sosial yang tidak memiliki divisi media. Apapun bidang yang digeluti oleh sebuah gerakan, semuanya memiliki perangkat yang bertugas untuk menciptakan atau berhubungan dengan media.

Fungsi media massa sesungguhnya adalah memberikan informasi, memberikan pendidikan, memberikan hiburan, dan melakukan control social. Dalam menyajikan informasi media harus netral dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Namun fenomena yang terjadi sekarang ialah sebaliknya dimana media cenderung tidak netral, baik secara teoritis maupun praktis, pemilihan atas peristiwa apa yang menjadi headline, siapa yang menjadi narasumber, bahasa apa yang digunakan, atau sudut pandang apa yang dipakai dalam membaca fakta.

Terbukanya ruang kebebasan berpolitik secara luas berdampak pada keleluasaan seseorang menjadi politikus. Hal ini terlihat dari banyaknya

para pebisnis, para professional maupun artis yang berbondong-bondong ikut andil bagian dalam politik praktis. Menurut Denny J.A (2006: 55), dewasa ini di Indonesia banyak dari para kaum pemilik modal ataupun pebisnis yang memiliki afiliasi politik terhadap kepentingan ekonomi mereka, dan tidak jarang dari mereka memasuki bidang-bidang dunia warta atau pers.

Sejak ditetapkannya undang-undang kebebasan pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1, media dengan bebas dapat mensortir berita yang akan diwartakan kepada publik. Keleluasaan media dalam pemberitaan pada mulanya diharapkan dapat berperan menjadi instrument pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Meskipun sampai saat ini peranan tersebut tetap dijalankan dengan baik oleh media, akan tetapi permasalahan independensi pers media yang memudar juga menjadi permasalahan sentral pers media.

Melihat dari perspektif akademis, adanya kebebasan pers tentu saja bernilai positif untuk pembangunan politik masyarakat Indonesia. Transparansi kinerja pemerintah, kasus-kasus pejabat pemerintah serta kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai ekonomi dan moneter dapat dijadikan muatan berita yang dapat dikonsumsi politik secara luas.

Dikarenakan saat ini masyarakat memilih banyak sumber yang dapat di akses guna mengetahui duduk permasalahan-permasalahan sosial politik. Hal yang demikian secara tidak langsung akan berimplikasi pada

peningkatan pemahaman terhadap ilmu politik dan juga berpengaruh positif terhadap sikap kedewasaan politik masyarakat.

Meskipun media memiliki peranan positif terhadap pembangunan politik masyarakat, media juga memiliki dampak negatif bagi perkembangan politik di masyarakat. Salah satu permasalahannya adalah terkooptasinya independensi pemberitaan dalam media telah menimbulkan beberapa polemik diantaranya adalah proses pembingkaiian berita atau dikenal dengan istilah *framing process*.

Pada hakikatnya *framing process* didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan sebuah informasi lebih daripada informasi yang lain, sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut (Eriyanto, 2012: 29). Dari definisi tersebut dapat ditarik sebuah penalaran bahwasanya *framing* merupakan sebuah usaha yang dilakukan oknum media agar dapat menciptakan ingatan-ingatan positif maupun negatif dalam masyarakat.

Sedangkan menurut David Snow (2012: 21), proses pembingkaiian (*framing process*) merupakan upaya-upaya strategis yang dilakukan secara sadar oleh sekelompok orang untuk menampilkan pemahaman yang sama mengenai dunia dan diri mereka sendiri yang melegitimasi dan memotivasi aksi-aksi kolektif.

Dari teori tersebut dapat diasumsikan bahwasanya *framing process* merupakan tindakan konstruktif yang dibangun oleh sekelompok orang atau individu yang dapat berdampak luas pada khalayak umum. Proses

pembingkaiian berita dapat berdampak pada legitimasi sosial, pembentukan opini publik serta dapat menjadi sarana konstruksi gerakan sosial (*social movment*).

Meskipun saat ini banyak awak media yang menyatakan bahwa mereka telah objektif dan independen dalam menelaah kasus dan menyiarkan pemberitaan, akan tetapi proses pembingkaiian berita yang kurang independen masih saja kerap terjadi. Hal seperti ini secara akademis dan hukum ternilai cacat.

Sebagai contoh kongkret adalah pemilihan diksi terhadap kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos), bantuan daerah bawahan (BDB), dan bantuan operasional sekolah (BOS). Persekongkolan itu diungkapkan puluhan pengacara saat mengajukan gugatan *class action* terhadap Gatot Pujo Nugroho di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Saat mendaftarkan gugatan itu, pengacara yang berjumlah 23 orang tersebut mengharapkan, pengadilan mengeluarkan perintah terhadap aparat untuk menuntaskan keterkaitan Gatot.

Gugatan itu diterima PN Medan dengan nomor perkara 309/Pdt.6/2013/PN.MDN. Selain mengajukan gugatan, puluhan pengacara terkemuka di daerah ini juga melaporkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Sumut tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, lembaga antikorupsi itu dinilai mampu menuntaskan kasus tersebut (opentender.net, 2015: 1).

Banyak fakta yang menjadi dasar gugatan dan mengarah kepada Gatot dalam kasus dugaan korupsi itu. Dari berbagai kesaksian terdakwa dalam proses penyidikan oleh aparat saat mengusut kasus dugaan korupsi itu, sampai ke tingkat

persidangan di pengadilan, kasus yang mengakibatkan negara mengalami banyak kerugian.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor: 43.A/LHP/XVIII.MDN/06/2012 ditemukan proyek fiktif dan pengusulan proposal tidak melalui biro terkait sebanyak 1.631 proposal. Bahkan, dalam persidangan, terdakwa Aminuddin yang merupakan mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Rutin Biro Umum Setda Pemprov Sumut, membuka nama-nama penerima aliran dana Bansos dan Biro Umum (opentender.net, 2015: 1).

Selain itu, terdakwa Aidil Agus dan Imom Saleh Ritonga (opentender.net: 2015), dalam keterangannya mengungkapkan adanya aliran dana ke sejumlah anggota DPRD Sumut dan Gubernur Sumut. "Sayangnya, yang ditangkap dan diproses oleh Polda Sumut dan Kejati Sumut hanya PNS bawahan saja. Kelas kakapnya, yaitu Gatot Pujo Nugroho dan sejumlah anggota DPRD Sumut yang terlibat namun tidak diproses. Kasus ini bisa melebar kemana - mana bila KPK menangani korupsi itu. Aparat pun bisa diproses jika terbukti terlibat persekongkolan.

Adi Mansar selaku penggugat lainnya menyampaikan, banyak bukti dugaan korupsi yang melibatkan Gatot (opentender.net, 2015: 2). Misalnya, realisasi dana BOS dengan anggaran sebesar Rp 17 miliar yang bersumber dari APBN untuk Sumut. Dana BOS itu justru dialihkan untuk dana Bansos dan BDB ke 33 Kabupaten/Kota se-Sumut. Penyidik Polda Sumut hanya menetapkan M Ilyas Hasibuan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) menjadi tersangka.

Ditambahkan, sesuai aturan yang berlaku pada pasal 31 ayat 4 amandemen UUD 1945 disebutkan (opentender.net, 2015: 2), untuk sektor pendidikan harus dianggarkan minimal 20 % dari total APBD. Sementara dalam tahun-tahun ini

juga, sektor dana Bansos dan BDB melonjak tinggi secara signifikan mencapai 80 % dari tahun sebelumnya 2009. Dimana pada tahun 2009 anggaran dana Bansos hanya Rp190 miliar, sejak tahun 2010 menjadi 1,6 triliun bahkan lebih.

Diduga, tingginya dana Bansos dan BDB ini, dipergunakan Gatot Pujo Nugroho untuk menarik simpatik masyarakat, saat Pemilihan Gubernur. Dana Bansos dan BDB itu sengaja ditabur menjelang Pemilihan Gubernur supaya muncul simpatik warga Sumut kepada pemenang Pilgubsu tersebut. Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho pun belum memberikan keterangan resmi atas tuduhan itu.

Penulis menitik beratkan penelitian tentang kasus kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos), bantuan daerah bawahan (BDB), dan bantuan operasional sekolah (BOS) Gatot Pujo Nugroho di Viva News.com dan Media Indonesia.com, karena peristiwa Korupsi Gubernur Medan Gatot Pujo Nugroho merupakan bencana yang secara langsung berimbas terhadap kerugian negara. Selain itu, terdapat makna yang saling bertentangan terhadap pemberitaan tentang peristiwa korupsi Gubernur Medan Gatot Pujo nugroho di Viva News.com dan Media Indonesia.com

Pemberitaan-pemberitaan media tentang kasus tersebut kental dengan muatan politik. Pemberitaan di media surat kabar Viva News.com memilih diksi Gatot Pujo Nugroho dan Pusaran Korupsi Bansos dan media Indonesia.com memilih diksi Ratusan Juta Dana Bansos Gubernur Gatot. Selain itu, Vivanews.com dan Media Indonesia.com adalah dua portal berita *online* yang sama-sama memiliki perhatian cukup tinggi terhadap sebuah realitas hukum. Namun, tidak dapat dipungkiri juga perbedaannya dalam

mengkonstruksi sebuah realitas hukum. Meskipun masing-masing media memberitakan topik yang sama, akan tetapi dapat dicermati ada pembingkaiannya yang berbeda dalam penulisan berita-berita tersebut sehingga memberikan maksud dan arti yang berbeda pula.

Dalam kasus penulis mempertimbangkan latar belakang sejarah yang dimiliki Media Indonesia, yakni pemiliknya adalah Surya Paloh partai Nasdem yang merupakan saingan Abu Rizal Bakrie di Golkar. Dimana adanya keterkaitan antara Gatot Pujo Nugroho dan partai Nasdem dalam kasus ini. Atas dasar pertimbangan ini penulis bermaksud melihat apakah Media Indonesia.com tetap netral dalam mengungkapkan berita kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos), bantuan daerah bawahan (BDB), dan bantuan operasional sekolah (BOS) Gatot Pujo Nugroho. Dan penulis juga memilih Viva News.com sebagai bahan pertimbangan karena pemiliknya adalah Abu Rizal Bakrie yang merupakan saingan politik Surya Paloh, sehingga ada kemungkinan dalam pemberitaan kasus ini di Viva News.com akan diberitakan secara tegas dan lugas.

Selain perhatiannya yang cukup tinggi terhadap dinamika dalam negeri, kedua media tersebut juga memiliki jaringan media yang mampu membentuk rantai informasi secara mudah. Hal yang demikian mengindikasikan bahwasanya di dalam dua media tersebut terbelenggu oleh dua kepentingan politik yang berbeda. Kepentingan-kepentingan politik inilah yang secara tidak langsung mengintervensi independensi pers melalui proses pembingkaiannya berita (*framing process*).

Media sebagai salah satu kekuatan politik memang telah banyak di perbincangkan dalam konteks politik modern. Selain LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Pengusaha, Militer dan Mahasiswa, Media merupakan element yang memiliki pengaruh dalam bidang politik. Ditambah lagi dengan diberlakukannya Undang-undang kebebasan pers, Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 membuat media semakin sentral peranannya di dalam ranah politik praktis.

Peranan media terhadap kepentingan-kepentingan politik tidak dapat terlihat secara langsung tanpa menggunakan analisa-analisa objektif di dalamnya. Meskipun demikian, kebutuhan organisasi-organisasi politik (semisal partai politik) terhadap tingkat elektabilitas maupun pencitraan para calon ataupun partai itu sendiri dapat dijadikan alasan mendasar dari hubungan media dan kepentingan-kepentingan organisasi politik.

Kajian-kajian maupun tulisan-tulisan yang berkenaan tentang media sebagai kekuatan politik telah banyak berkembang dari pemikiran para akademisi. Sebut saja Timothy Besley, Robin Burgess, dan Andrea Prat tentang *Political Agency*. Di dalam tulisan tersebut mereka berpendapat bahwasanya, media memiliki peranan yang cukup sentral pada ranah politik.

Besley, Burgess, dan Prat berargumentasi bahwasanya media terbagi menjadi dua bagian yaitu: Pertama media yang bebas atau media yang independen. Media yang bebas nantinya akan berdampak pada meningkatnya pelayanan pemerintah dalam cangkupan kepentingan publik. Kedua dinamakan media yang terperangkap. Media tersebut merupakan

golongan media yang terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan politik pemerintah, sehingga kemudian akan berdampak pada ketidakbebasan media dalam mewartakan suatu peristiwa (Timothy Besley, Robin Burgess, dan Andrea Prat, 2006: 61).

Mengacu dari perspektif tersebut penulis berasumsi bahwasanya peranan media terhadap dunia perpolitikan sangatlah besar. Media dewasa ini bukan hanya berpengaruh pada tatanan sistem pemerintahan elit pemerintah saja, akan tetapi juga berkembang sebagai kekuatan politik para pemilik modal dan para pengusaha yang terjun ke dalam dunia politik.

Kepentingan-kepentingan politik pemilik perusahaan media sedikit banyak telah berpengaruh pada nilai subjektivitas dan nilai independensi berita. Hal ini dapat tercermin dari pemilihan diksi-diksi pada berita yang menonjolkan ataupun menjatuhkan seseorang atau kelompok dalam kepentingan-kepentingan politik. Sehingga berita-berita yang saat ini terwartakan kepada masyarakat jauh dari etika-etika jurnalistik dan pewartaan saat ini cenderung sebagai alat pencitraan semata.

Di Indonesia sendiri ada beberapa media yang memiliki afiliasi terhadap kepentingan politik. Media seperti Viva News.com dan Media Indonesia.com merupakan dua media massa yang kental akan muatan politik. Dalam pemberitaan berbagai kasus politik, kepentingan politik yang berbeda diantara kedua pemilik perusahaan media tersebut secara tidak langsung berdampak pada pemberitaan media pada masyarakat.

Pemilihan diksi terhadap kata-kata yang diwartakan kepada masyarakat dijadikan sebagai alat tarik ulur kepentingan politik pada dua media televisi tersebut. Hal ini tentu saja dilakukan oleh kedua media tersebut untuk menciptakan bingkai (*frame*) yang bertujuan untuk keuntungan-keuntungan politik para pemilik perusahaan media.

Dengan memperhatikan permasalahan mendasar tersebut terdapat anggapan bahwa, adanya kasus korupsi Gubernur Medan Gatot Pujo Nugroho pada media Viva News.com dan Media Indonesia.com. Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti membuat judul skripsi yaitu, ” **Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Gubernur Medan Gatot Pujo Nugroho Di Viva News.Com Dan Media Indonesia.Com Periode Juni – Desember 2015**”.

I.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka batasan masalah pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana Framing Korupsi Gubernur Medan Gatot Pujo Nugroho Di Viva News.Com Dan Media Indonesia.Com?”

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut di atas, maka permasalahan pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana framing Korupsi Gubernur Medan Gatot Pujo Nugroho Di Viva News.Com Dan Media Indonesia.Com?
2. Bagaimana posisi media Viva News.com dan Media Indonesia.com dalam kasus Korupsi Gubernur Medan Gatot Pujo Nugroho?

I.4 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menjawab dan menganalisa pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui framing pada Korupsi Gubernur Medan Gatot Pujo Nugroho Di Viva News.Com Dan Media Indonesia.Com
2. Untuk mengetahui posisi Viva News.com dan Media Indonesia.com dalam kasus Korupsi Gubernur Medan Gatot Pujo Nugroho.

I.5 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa dengan adanya penelitian ini dapat membawa manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan dalam mengembangkan keilmuan dibidang humas tentang Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Gubernur Medan Gatot Pujo Nugroho Di Viva News.Com Dan Media Indonesia.Com.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan pengetahuan tambahan tentang Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Gubernur Medan Gatot Pujo Nugroho Di Viva News.Com Dan Media Indonesia.Com.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan masukan tempat peneliti bekerja untuk mendalami tentang Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Gubernur Medan Gatot Pujo Nugroho Di Viva News.Com Dan Media Indonesia.Com.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab yang terdiri dari:

1. Bab I: Pendahuluan. Yang Berisi tentang gambaran umum yang meliputi latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.
2. Bab II: Kajian Pustaka. Dalam bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Gubernur Medan Gatot Pujo Nugroho Di Viva News.Com Dan Media Indonesia.Com.
3. Bab III: Penyajian Data. Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum suatu perusahaan, struktur organisasi, dan lain sebagainya.

Kemudian menjelaskan tentang Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Gubernur Medan Gatot Pujo Nugroho Di Viva News.Com Dan Media Indonesia.Com.

4. Bab IV: Analisis Data. Dalam bab ini menjelaskan temuan-temuan yang terjadi dalam bentuk-bentuk komunikasi yang digunakan Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Gubernur Medan Gatot Pujo Nugroho Di Viva News.Com Dan Media Indonesia.Com.
5. Bab V: Penutup/Kesimpulan. Dalam bab ini menjelaskan tentang seluruh rangkuman yang ada dalam penelitian ini dan menjelaskan inti dari hasil penelitian ini